



## Yuliana: Saya Akan Memperjuangkan Keinginan Masyarakat Kalbar

**PONTIANAK, TRIBUN** - Partai Gerindra merombak perwakilannya di kursi jabatan Wakil Ketua DPRD Kalbar. Suriansyah yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua digantikan oleh rekannya, Yuliana.

Yuliana kini telah resmi dinyatakan menjabat sebagai Wakil Ketua, pada rapat paripurna pengambilan sumpah/janji pengangkatan jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat sisa masa Jabatan 2019-

2022, Senin (31/10).

Ia menjelaskan bahwa setelah pengambilan sumpah ini, ia akan fokus untuk melanjutkan dan menjalankan tugas barunya sebagai Wakil Ketua DPRD Kalbar, mengingat pembahasan APBD murni 2023 telah menanti-

nya. "Untuk saat ini saya akan melanjutkan, karena sebentar lagi pembahasan APBD murni 2023. Dan disitu juga

■ Bersambung ke hal. 7



TRIBUNPONTIANAK/TRI PANDITO WIBOWO

**PARIPURNA** - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Yuliana, saat rapat paripurna pengambilan sumpah/janji pengangkatan jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat sisa masa Jabatan 2019-2024, Senin (31/10).

## Yuliana: Saya Akan Memperjuangkan Keinginan

Sambungan Hal.1

masih melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Suriansyah. Saya selaku orang yang dipercaya untuk mengganti beliau, melanjutkan lah kinerja beliau dan bersinergi dengan Partai Politik yang telah dipercayakan," ucap Yuliana kepada wartawan.

Selain itu, ia juga berkomitmen bahwa sebagai wakil ketua DPRD ia akan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat Kalimantan Barat.

"Dan juga saya akan memperjuangkan yang menjadi keinginan masyarakat Kalimantan Barat, yang mengacu kepada apa yang menjadi program Partai Gerindra," ucapnya.

Memasuki pembahasan APBD murni tahun 2023, ia menjelaskan bahwa ia dan jajaran pimpinan akan melakukan upaya-upaya untuk memperlancar pembahasan tersebut.

Dengan harapan agar tidak terjadi kendala-kendala yang menyebabkan molornya pembahasan tersebut, me-

lampau target pengesahan yang telah disepakati. "Siang ini kami akan adakan rapat pimpinan DPRD dan ketua-ketua fraksi, untuk menghadirkan semua anggota pada paripurna jawaban Gubernur besok," katanya/

"Harapan kami dengan adanya rapat pimpinan dengan ketua-ketua fraksi ini, bisa mendatangkan lah anggota-anggotanya untuk hadir besok, supaya ini tidak terkendala dan tidak molor pembahasan APBD murni tahun 2023," ucapnya.

Ia menjelaskan, bahwa DPRD Kalimantan Barat telah menjadwalkan pembahasan APBD murni tahun 2023 tersebut rampung sebelum tanggal 30 November 2022 mendatang.

"Memang kita jadwalkan itu sebelum 30 November, ya memang kita antisipasi takutnya ada kendala-kendala yang memang belum ada kesepakatan, sehingga sebelum 30 November kita harus selesaikan pembahasan APBD murni 2023," ucapnya.

Pasca agenda tersebut, Yuliana menanggapi kabar kerenggangan hubungan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang belakangan ini sering beredar.

Menurutnya, hal itu tidak lebih dari sekadar persoalan koordinasi antara lembaga eksekutif dan yudikatif, yang merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi.

Sebab, kedua lembaga memiliki agenda dan programnya masing-masing, yang mana kepentingan kedua belah pihak tentu menjadi objek utama yang harus disinkronisasikan.

"Sebenarnya itu semuanya koordinasi yang baik lah, antara eksekutif dan legislatif. Yang mana kan kita juga memperjuangkan yang menjadi aspirasi masyarakat Kalbar sesuai dengan Dapil-dapil anggota dewan yang ada di lembaga ini."

"Dan untuk Pemerintah Daerah juga kan akan memaksimalkan kinerja mereka, untuk memperjuangkan yang menjadi visi misi dari

Pak Gubernur juga."

"Sehingga kami harus mensinkronisasikan antara keinginan dari Pemerintah Daerah dan juga kami selaku Wakil Rakyat," tegasnya.

Selain itu, menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa Gubernur Sutarmidji yang beberapa kali tidak hadir dalam rapat paripurna, ia mengatakan bahwa hal tersebut dapat dimaklumi mengingat kesibukannya sebagai Kepala Daerah.

"Ya kita ini kan ada kesibukan masing-masing, baik Pak Gubernur selaku kepala daerah yang banyak juga kesibukannya, sehingga kami juga memaklumi lah ketidakhadiran beliau dikarenakan kesibukan."

"Yang penting ada informasi yang diberikan kepada kami, ataupun surat yang menyatakan bahwa beliau mengunjungi Daerah atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sehingga kami ini tidak menyalahkan Pemerintah Daerah yang tidak hadir," ucapnya. **(kbn/fir)**